



1 PENDAHULUAN

Latar Belakang

Peraturan Presiden No 32 Tahun 2011 tentang MP3EI (*Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia*) merupakan sebuah langkah besar pemerintah dalam mencapai visi Indonesia mandiri, maju, adil dan makmur yang menjadi arah pembangunan ekonomi Indonesia hingga tahun 2025. MP3EI merupakan sebuah konsep yang komprehensif dalam dengan memadukan berbagai potensi wilayah Indonesia dengan berbagai dinamika. Latar belakang dari Perpres tersebut tersirat kekhawatiran bahwa tantangan pembangunan ekonomi Indonesia tidak mudah diselesaikan karena mengharuskan untuk senantiasa siap terhadap perubahan.

Untuk melaksanakan langkah tersebut diperlukan investasi senilai Rp 4 012 triliun dimana pemerintah hanya akan berkontribusi sebesar 10 persen dan BUMN sebesar 18 persen, sementara kontribusi investasi pihak swasta sebesar 51 persen, sedangkan sisanya sebesar 21 persen akan dilaksanakan secara bauran antara pemerintah, BUMN dan swasta (MP3EI, 2012).

Tabel 1 Jumlah investasi koridor ekonomi MP3EI

No	Koridor	Nilai Investasi (Rp Triliun)
1	Sumatera	714
2	Jawa	1 290
3	Kalimantan	945
4	Sulawesi	309
5	Bali – Nusa Tenggara	133
6	Papua – Kep Maluku	622

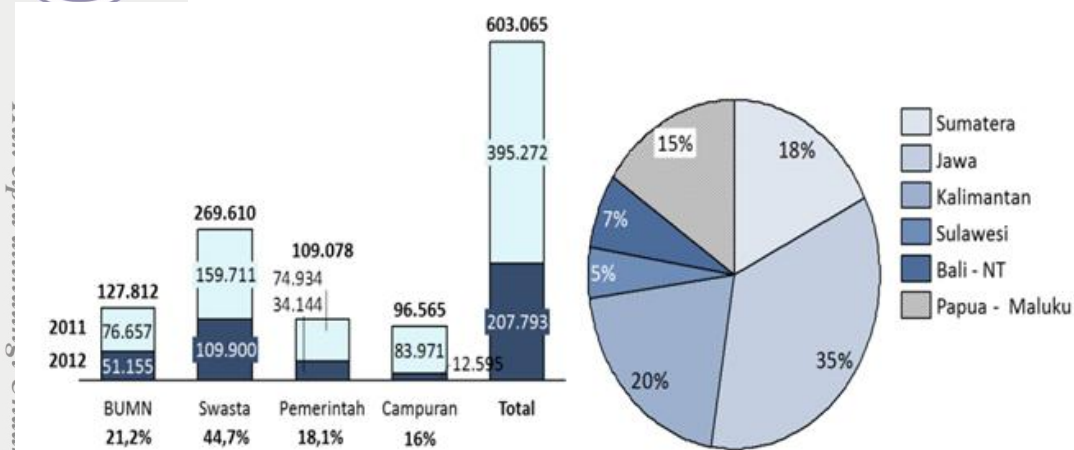
Sumber : MP3EI (2012)

Menurut laporan MP3EI tahun 2013, target investasi direvisi menjadi Rp 4 335 triliun yang tervalidasi sampai dengan bulan Maret 2013. Untuk realisasi investasi sampai dengan bulan Maret 2013 senilai Rp 603 Triliun yang terdiri dari investasi di sektor riil sebanyak 89 proyek dan sektor infrastruktur sebanyak 120 proyek.

Realisasi investasi di koridor Jawa senilai Rp 209 triliun, koridor Sumatera senilai Rp 106 triliun, koridor Kalimantan senilai Rp 123 triliun, koridor Sulawesi senilai Rp 28 triliun, koridor Bali-Nusa Tenggara senilai Rp 42 triliun dan koridor Papua Maluku senilai Rp 93 triliun.

Porsi investasi pihak swasta senilai Rp 270 triliun atau sebesar 44.7 persen dari jumlah realisasi investasi sampai dengan bulan Maret 2013. Namun realisasi ini masih jauh dari target investasi pihak swasta yang ditetapkan berdasarkan MP3EI yakni sebesar Rp 2 211 triliun.





Sumber : MP3EI (2013)

Gambar 1 Jumlah porsi investasi koridor ekonomi MP3EI

Hal di atas menunjukkan bahwa peran investasi swasta terhadap Indonesia sebagai negara *emerging market* sangat besar dalam pembangunan dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara ASEAN5 dan negara maju, sehingga dibutuhkan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor produksi, dimana salah satu faktor produksi yang mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut merupakan sumber dana jangka panjang untuk investasi.

Akumulasi modal biasanya digunakan untuk menjalankan perekonomian dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam perekonomian yang terbuka, sumber pembiayaan pembangunan tidak hanya tergantung pada faktor domestik saja, tetapi dapat bersumber dari luar negeri. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah penanaman modal asing langsung (*foreign direct investment*). Hal ini dibutuhkan karena dana dari dalam negeri tidak mencukupi untuk menjalankan kegiatan ekonomi secara maksimal (*full employment*).

Realisasi penanaman modal di Indonesia tahun 2012 senilai Rp 313.2 triliun atau meningkat 24.6 persen dibandingkan dengan tahun 2011. Kontribusi PMA Tahun 2012 untuk realisasi investasi tersebut adalah sebesar 70.56 persen, sedangkan kontribusi PMA pada tahun 2011 adalah sebesar 69.75 persen atau mengalami peningkatan ± 0.81 persen (BKPM, 2012).

Tabel 2 Realisasi penanaman modal Indonesia tahun 2011 - 2012

Keterangan	2011 (Rp Triliun)	2012 (Rp Triliun)
PMDN	76	92.2
PMA	175.3	221
Total	251.3	313.2

Sumber : BKPM (2013)

Pada triwulan III-2013 selama bulan Juli sampai dengan September 2013, nilai investasi di Indonesia mencapai angka Rp 100.5 triliun yang terdiri dari penanaman modal dalam negeri sebesar Rp 33.5 triliun dan penanaman modal



asing sebesar Rp 67 triliun. Besarnya investasi tersebut membawa angin segar untuk perekonomian Indonesia, namun lebih lanjut ternyata nilai investasi yang menembus angka Rp 100.5 triliun hanya menyerap 411 543 tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja tersebut terbilang kecil. Pada triwulan II realisasi investasi hanya mencapai angka Rp 99.8 triliun, namun mampu menyerap 626 376 tenaga kerja. Data tersebut menunjukkan investasi yang mencapai angka Rp100,5 triliun tersebut ditopang sektor usaha padat modal. Kedepan, sebaiknya pemerintah tidak lagi hanya memfokuskan terhadap investasi padat modal, namun harus mulai memperhatikan investasi di sektor padat karya seperti sektor pertanian (BKPM, 2013).

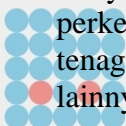
Tabel 3 Penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama

No	Lapangan Pekerjaan Utama	2010	2011	2012	2013 *)
1	Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	42 825 807	42 475 329	41 205 030	39 959 073
2	Pertambangan dan Penggalian	1 188 634	1 352 219	1 620 028	1 555 564
3	Industri	13 052 521	13 696 024	14 211 562	14 784 843
4	Listrik, Gas dan Air	208 494	257 270	297 805	254 528
5	Konstruksi	4 844 689	5 591 084	6 103 457	6 885 341
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	22 212 885	23 239 792	24 020 934	24 804 705
7	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	5 817 680	5 585 124	5 191 771	5 231 775
8	Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan	1 639 748	2 058 968	2 779 201	3 012 770
9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	15 615 114	17 025 934	17 373 017	17 532 590
	Total	107 405 572	111 281 744	112 802 805	114 021 189

Sumber : BPS (2013)

*) data sampai dengan bulan Februari 2013

Salah satu alasan kenapa sektor pertanian harus menjadi prioritas dalam investasi karena sektor pertanian memiliki andil yang sangat besar dalam penyerapan tenaga kerja. Data Badan Pusat Statistik mencatat pada bulan Februari 2013 ada sebanyak 39 juta tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan atau sebesar 35.04 persen dari total jumlah pekerja di Indonesia. Dari total sebanyak 39 juta tenaga kerja tersebut ternyata \pm 53.63 persen merupakan tenaga kerja yang berasal dari sub sektor perkebunan sebanyak 21 juta tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja sub sektor perkebunan masih dominan dibandingkan dengan sektor lainnya karena sektor perkebunan merupakan sektor padat karya (*labor intensive*).



Perumusan Masalah

Untuk mengakomodir kepentingan pemerintah dan pihak investor maka dalam MP3EI telah ditetapkan fokus utama komoditas perkebunan yang masuk dalam program tersebut yakni kelapa sawit, kakao, dan karet. Hal ini dilakukan melalui (1) Peningkatan nilai tambah dan perluasan rantai nilai proses produksi serta distribusi dari pengelolaan aset dan akses sumberdaya kelapa sawit, karet dan kakao Indonesia; (2) Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik (untuk kelapa sawit, karet dan kakao) dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional; (3) Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi, proses, maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan, menuju ekonomi yang didorong inovasi pada industri kelapa sawit, karet dan kakao. (Said, 2013).

Tabel 4 Target dan Realisasi MP3EI Sektor Perkebunan

Koridor	Target (Rp Triliun)				Realisasi (Rp Triliun)			
	Sawit	Karet	Kakao	Total	Sawit	Karet	Kakao	Total
Sumatera	44	3		47	1.6	0.3	-	1.9
Kalimantan	48	-		48	-	-	-	-
Sulawesi	-	-	1	1	-	-	0.3	0.3
Total	92	3	-	96	1.6	0.3	0.3	2.2

Sumber : MP3EI (2013)

Target investasi sektor perkebunan di daerah Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi dalam kurun waktu 5 tahun senilai Rp 96 triliun, namun realisasi investasi senilai ± Rp 2.2 triliun (MP3EI, 2013). Peningkatan harga komoditas perkebunan di dunia internasional seperti CPO, karet dan kakao telah menimbulkan ketertarikan investor asing pada sektor perkebunan karena Indonesia merupakan eksportir terbesar minyak sawit dunia, produsen kakao dan karet terbesar ke-2 dunia. Faktor *input* seperti luas lahan, buruh yang terampil dan tersedia dalam jumlah yang cukup serta kebutuhan dunia akan bahan pokok hasil perkebunan yang bervariasi seperti minyak sawit, karet, coklat sangat potensial untuk ditanam di Indonesia yang merupakan salah satu faktor *pull factor* investasi asing langsung di sektor perkebunan, namun realisasi investasi di sektor perkebunan hanya sebesar 2.29 persen dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sehingga hal ini menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

Perumusan masalah yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi investasi asing langsung sektor perkebunan di Indonesia ?
2. Strategi apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan investasi asing langsung sektor perkebunan di Indonesia ?



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IPB tahun 2014

Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor



IPB-IPB

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dijabarkan, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi investasi asing langsung sektor perkebunan di Indonesia.
2. Merumuskan strategi untuk meningkatkan investasi asing langsung di sektor perkebunan di Indonesia.

Manfaat Penelitian

Agar pemerintah Indonesia dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan jumlah investasi asing langsung di sektor perkebunan di Indonesia sehingga kebutuhan masyarakat, baik untuk kebutuhan ekspor dan kebutuhan lokal akan hasil perkebunan dan hasil pengolahannya dapat dipenuhi mengingat biaya investasi di bidang perkebunan sangat besar.

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada faktor faktor ekonomi yang berpengaruh pada investasi asing langsung di sektor perkebunan serta merumuskan strategi dengan menentukan alternatif dan prioritas strategi yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan investasi asing langsung di sektor perkebunan. Tahap implementasi dan evaluasi strategi di luar ruang lingkup penelitian ini.

2 TINJAUAN PUSTAKA

Investasi

Defenisi dan Jenis Investasi

Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau perbelanjaan penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan. Investasi dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu *business fixed investment*, *residential investment*, dan *inventory investment* (Mankiw, 2003). Kegunaan investasi antara lain 1) menciptakan efek promosi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi; 2)

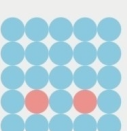
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
 2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Hak cipta dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IPB

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan MB-IPB



MB-IPB
Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis
Institut Pertanian Bogor

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.